

URGENSI BIMBINGAN DAN PENYULUHAN (ISLAM) DALAM PEMBANGUNAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

*Wiwit Widiansyah**

Abstract:

World development and changes have many impacts to human beings. The changes happen almost in every aspect of life, including physical and nonphysical aspects. The physical changes includes means of communication, transportation, building facilities, agriculture, and many others. The other includes values and norms, tradition, mental attitude, family life pattern, work culture, daily life pattern, etc. These changes bring not only positive effects, but also negative ones to human beings. To increase social welfare, counseling has a significant role to solve social problems, especially in supporting education process and changing its target's behavior.

Keywords:

guidance and counselling, positive effects, negative effects, social welfare

Pendahuluan

Perkembangan kemajuan yang terjadi sekarang ini sangat mempengaruhi kehidupan manusia. Hampir semua aspek kehidupan masyarakat mengalami perubahan. Perubahan yang terjadi tidak hanya meliputi perubahan yang bersifat fisik, tetapi juga perubahan yang bersifat nonfisik. Perubahan yang bersifat fisik misalnya perubahan sarana komunikasi, sarana transportasi, fasilitas-fasilitas gedung, sarana

* Penulis adalah Magister Manajemen Pembangunan Sosial Universitas Indonesia (UI) Jakarta, Pengajar Mata Kuliah Pekerjaan Sosial dan Kesejahteraan Sosial pada Jurusan Dakwah Jurusan Dakwah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto.

pertanian, dan lain sebagainya. Perubahan yang bersifat nonfisik misalnya nilai dan norma, adat istiadat, sikap mental, pola hidup berkeluarga, budaya kerja, pola sehari-hari, dan lain sebagainya. Perubahan-perubahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat tersebut sifatnya ada yang sangat lambat (hampir terlihat statis), ada yang lambat (biasa-biasa saja), dan ada yang cepat dan ada pula yang sangat cepat. Perubahan tersebut juga ada yang dikehendaki dan ada juga yang tidak dikehendaki. Perubahan ini kadang-kadang kurang disadari oleh masyarakat, sebagian memang ada yang sengaja dilakukan guna menyesuaikan diri dengan tuntutan perkembangan yang terjadi.

Pada kenyataannya, perubahan kemajuan – baik yang dikehendaki sekalipun – tidak hanya membawa dampak positif terhadap kehidupan manusia, tetapi juga membawa dampak negatif, yang justru membawa kesengsaraan terhadap kehidupan manusia. Tentu yang kita harapkan adalah perubahan yang terjadi dapat membawa kesejahteraan terhadap kehidupan masyarakat, bukan malah sebaliknya. Kondisi-kondisi seperti ini dipicu oleh banyak faktor. Faktor-faktor tersebut ada yang bersumber dari dalam dan dari luar diri manusia. Agar perubahan tersebut semaksimal mungkin dapat membawa kesejahteraan terhadap kehidupan manusia, diperlukan upaya yang dapat mempengaruhi dan mengubah perilaku manusia ke arah penyesuaian yang lebih baik.

Hakekat Bimbingan Dan Penyuluhan

Bila kita melihat dasar berpijak berbagai kajian ilmu sosial, dapat dipastikan di dalamnya terdapat unsur yang sangat penting, yaitu filosofi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa filosofi merupakan kata *benda* yang artinya sama dengan kata falsafah. Falsafah diartikan: (a) sebagai suatu pandangan hidup; (b) sebagai landasan pemikiran yang bersumber kepada kebijakan moral tentang segala sesuatu yang akan dan harus diterapkan dalam praktek. Berangkat dari pengertian di atas, kita dapat menarik benang merah sebuah filosofi bimbingan dan penyuluhan sebagai:

1. suatu proses pendidikan yang dilakukan melalui sistem pendidikan luar sekolah guna meningkatkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan seseorang dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya.

2. suatu proses perubahan perilaku seseorang sehingga mampu dan mau melaksanakan tugas dan tanggung jawab kehidupannya guna mewujudkan kesejahteraan sosialnya.
3. suatu upaya bekerjasama dengan masyarakat, bukan bekerja untuk masyarakat. Kehadiran para penyuluh sosial bukan sebagai penentu atau pemaksa, tetapi sebagai fasilitator untuk dapat menciptakan suasana dialogis dengan masyarakat agar mampu menumbuhkan, menggerakkan, serta memelihara partisipasi masyarakat dalam upaya mengembalikan keberfungsian sosial mereka.
4. suatu proses independensi masyarakat. Penyuluhan sosial tidak menciptakan ketergantungan, tetapi harus mampu mendorong semakin terciptanya kreativitas dan kemandirian masyarakat agar semakin memiliki kemampuan untuk berswakarsa, swadaya, swadana, dan swakelola dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan guna tercapainya tujuan, harapan, dan keinginan-keinginan masyarakat sasarnya.
5. Bimbingan dan Penyuluhan yang dilaksanakan harus selalu mengacu kepada terwujudnya kesejahteraan sosial masyarakat – berupa keberfungsiann sosial – dan tetap menunjung tinggi harkat dan nilai-nilai kemanusiaan.

Dalam konteks pembangunan kesejahteraan sosial, bimbingan dan penyuluhan memiliki kepentingan besar untuk berperan dalam mengatasi masalah sosial masyarakat, khususnya dalam menunjang suatu proses pendidikan dan perubahan perilaku kelompok sasaran. Dari beberapa referensi, penulis memformulasikan ranah yang dapat menjadi wahana penerapan teknologi pelayanan bimbingan dan penyuluhan antara lain sebagai berikut.

1. Bimbingan dan Penyuluhan Islam dalam proses penerangan, diartikan sebagai proses untuk memberikan penerangan kepada masyarakat tentang segala sesuatu yang belum diketahui dengan jelas yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat sehingga menjadi dipahami dan masyarakat memiliki kemauan dan motivasi untuk melaksanakan/menerapkan dalam rangka peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat.¹

¹ Totok Mardikanto, *Penyuluhan Pembangunan Pertanian*, (Surakarta: Sebelas Maret University Press), 1993.

2. Bimbingan dan Penyuluhan Islam dalam proses perubahan perilaku, yaitu proses pengubahan perilaku yang meliputi: perubahan sikap, kemauan, dan semangat masyarakat atau kelompok sasaran sehingga mereka tahu, mau, dan memiliki motivasi melaksanakan tugas-tugas kehidupan mereka sesuai dengan tuntutan perubahan dan kebutuhan-kebutuhan dalam rangka peningkatan kesejahteraan sosial mereka.²
3. Bimbingan dan Penyuluhan Islam dalam proses pendidikan, yaitu suatu proses pengubahan kemampuan dan perilaku masyarakat yang meliputi: pengetahuan, sikap, dan keterampilan masyarakat sehingga mereka mampu dan mau melaksanakan tugas-tugas dan tanggung jawabnya dan mampu memenuhi kebutuhan-kebutuhan serta mengatasi masalah-masalahan yang dihadapinya.³
4. Bimbingan dan Penyuluhan Islam dalam proses rekayasa sosial, yaitu proses penerapan rencana-rencana perubahan perilaku sosial masyarakat melalui pendekatan-pendekatan tertentu yang menekankan pada efisiensi dan efektivitas perubahan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.⁴

Menilik beberapa ranah yang menjadi fokus layanan BPI diatas, dapat kita pahami bahwa pada hakekatnya BPI merupakan proses pengubahan perilaku yang dilaksanakan terhadap sasaran pelayanan melalui proses pendidikan luar sekolah (*out-of-school*) sehingga mereka memiliki pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang dapat diterapkan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial mereka. Jadi jelas di sini bahwa bimbingan dan penyuluhan tidak hanya dilihat sebagai proses penyampaian informasi, tetapi lebih lanjut bergerak hingga pada terjadinya proses pengubahan perilaku dalam diri masyarakat atau seseorang (klien) tersebut.

Bimbingan dan Penyuluhan Islam dan Orientasi Kemasyarakatan

Eksistensi suatu disiplin ilmu atau bahkan suatu profesi didorong oleh adanya orientasi terhadap masyarakat, bagaimana melibatkan masyarakat serta bagaimana menempatkan masyarakat sebagai bagian

² *Ibid*

³ *Ibid, hal.*

⁴ *Ibid, hal,*

integral di dalamnya. Legalisasinya tentu saja tidak dapat dibangun oleh sesuatu yang instan, tetapi perlu upaya keras dan kontinu melalui sosialisasi nilai-nilai bimbingan dan penyuluhan di berbagai segmen / setting pelayanan serta ranah bimbingan dan penyuluhan.

Bimbingan dan Penyuluhan Sosial sejatinya adalah kunci dari konsep komunikasi massa yang kini sedang menguat dalam geliat dan situasi pemberdayaan peran masyarakat. Proses Bimbingan dan Penyuluhan yang menjunjung tinggi nilai *equitable* dan *responsiveness to people's needs* merupakan *resultante* dari proses dan prinsip-prinsip komunikasi.

Dengan kata lain, dalam konteks kesejahteraan sosial, komunikasi yang efektif menjadi sebuah parameter dari tuntutan masyarakat terhadap kinerja pelayanan bimbingan dan penyuluhan dari suatu lembaga pelayanan (baik pemerintah maupun masyarakat). Sebagai aktor penting dalam menjalankan proses dan praktek pengelolaan organisasi serta perancangan kebijakan-kebijakan publik, BPI kini semakin dituntut mewujudkan kesetaraan dan kemitraan. Kinerja pelayanan bimbingan dan penyuluhan yang semula bersandar pada prinsip *responsibility* (tanggungjawab) dan *obligation* (kewajiban), kini harus berpatokan pada kriteria *accountability*. Artinya posisi BPI harus benar-benar dapat dipertanggungjawabkan dan diakui oleh publik (penerima layanan/ masyarakat) baik dalam setting layanan klinis, koreksional, maupun pengembangan.

Berdasarkan hal-hal tersebut, beberapa prasyarat yang bisa dijadikan rujukan dalam meningkatkan eksistensi Bimbingan dan Penyuluhan Islam adalah :

1. Kemampuan merespon gelagat permasalahan masyarakat secara proporsional yang disesuaikan dengan kapasitas dan kebutuhan lokal. Penanganan terhadap isu-isu pelayanan kesejahteraan sosial perlu dikemas dan disesuaikan secara akurat sebagai tantangan-tantangan yang harus mampu dijawab oleh penyuluh masyarakat.
2. Fokuskan untuk merespon kebutuhan akan peningkatan kapasitas klien berdasarkan haknya. Penerapan layanan Bimbingan dan Penyuluhan yang efektif selain akan meningkatkan kualitas pelayanan, juga dapat menghindari *error of targeting* serta menjadi *sending message* yang efektif bagi masyarakat untuk lebih mengenal layanan BPI.

3. Harus melihat situasi pelayanan apa saja yang perlu didesain sedemikian rupa agar mampu menghasilkan petugas pelayanan yang dapat menerapkan beragam metode pelayanan serta mengintegrasikannya dengan dunia nyata secara menyeluruh terhadap pengguna (klien/masyarakat). Dalam konsepsi kesejahteraan sosial terdapat beberapa setting layanan antara lain :
 - * Setting Klinis / Medis / Rehabilitasi Sosial : Rumah Sakit, Panti, Trauma Center, dsb.
 - * Setting Kelompok / Organisasi : LSM / Orsos, Kelompok Penyembuhan (Theurapeutic Community), dsb.
 - * Setting Pengembangan Masyarakat
4. Manajemen pelayanan BPI memerlukan fasilitator yang beragam dan lengkap, baik dari akademisi atau praktisi berdasarkan *Core Competencies*⁵ dan *Job Specific Competencies*⁶ yang jelas agar tantangan-tantangan, misi, dan sasaran-sasaran organisasi dapat tercapai. Bimbingan dan Penyuluhan merupakan layanan yang bersifat aplikatif yang menggunakan menggunakan metode dan teknis dari berbagai disiplin ilmu, oleh karenanya adaptasi berbagai model layanan perlu dikaji dan dikembangkan secara kontinu.

Urgensi Bimbingan dan Penyuluhan Islam tidak semata-mata dilihat dari siapa obyek layanan, tetapi lebih dari itu terletak pada kejelasan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Dalam pandangan penulis, urgensi BPI ditinjau dari tujuannya antara lain: Pertama, sentuhan dari pemberian bimbingan dan penyuluhan adalah terjadinya perubahan perilaku dalam diri seseorang atau masyarakat yang dilayani yang meliputi: pengetahuan, sikap, dan keterampilan sehingga memiliki kemauan, kemampuan, dan kemandirian untuk memenuhi kebutuhannya, mengatasi masalah-masalah yang dihadapinnya, dan tidak selalu tergantung pada orang lain. Kedua, sentuhan lebih lanjut dari pemberian bimbingan dan penyuluhan adalah meningkatnya kesejahteraan sosial individu atau masyarakat yang memungkinkan bagi seseorang atau masyarakat untuk mengembangkan atau mengaktualisasikan diri dalam lingkungan sosial.

⁵ Aspek-aspek unik yang harus dimiliki oleh para pekerja di dalam organisasi agar organisasi mempunyai nilai kompetitif.

⁶ Aspek-aspek unik yang harus dimiliki oleh para pekerja untuk dapat menghasilkan kinerja yang superior pada pekerjaan atau kelompok pekerjaan tertentu.

Sesungguhnya sasaran Bimbingan dan Penyuluhan Islam adalah semua lapisan masyarakat yang terkait dengan permasalahan sosial, mulai dari masyarakat lapisan bawah hingga masyarakat kaum intelektual atau politikus, sehingga segenap elemen (akademik, praktisi) harus menyadari betul bahwasanya segmentasi layanan BPI dalam konteks pembangunan kesejahteraan sosial sangatlah luas. Penulis membagi layanan BPI dalam 4 (empat) segmen sasaran, antara lain :

1. Sasaran utama, yaitu kelompok penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) yang terlibat langsung dengan permasalahan sosial, seperti para penyandang masalah sosial anak terlantar, anak cacat, WTS, dll. termasuk di dalamnya keluarga dan lingkungan sosial. Sebagai sasaran utama, mereka harus menjadi pusat perhatian bimbingan dan penyuluhan sosial, sebab mereka inilah yang menjadi penderita langsung dalam permasalahan sosial tersebut.
2. Sasaran penentu (pemicu), yaitu kelompok yang secara langsung terlibat dalam pembuatan atau penentuan kebijakan penanganan permasalahan sosial atau kelompok pembuat kebijakan pembangunan nasional – disadari atau tidak disadari – yang mempunyai dampak terhadap munculnya permasalahan sosial tersebut. Termasuk dalam kelompok ini adalah kelompok legislatif, yudikatif, dan peneliti. Kelompok kedua ini biasanya kurang memperhatikan dampak sosial yang timbul tetapi lebih mengutamakan keberhasilan aspek ekonomi yang menjadi prioritas utama. Karena itu mereka pun perlu diberikan penyuluhan sosial. Pada segmen ini pendekatan konsultatif dan komunikatif dapat digunakan sebagai media untuk mensosialisasikan beberapa isu-isu yang berkembang sebagai bahan pendukung pentingnya layanan Bimbingan dan Penyuluhan.
3. Sasaran pelaksana, yaitu kelompok pelaksana kebijakan yang sudah dirumuskan yang secara langsung menyebabkan terjadinya atau munculnya permasalahan sosial, seperti: developer, pengusaha-pengusaha semua lapisan, pemilik industri-industri, dan lain-lain. Kelompok ini biasanya lebih mengutamakan kepentingan keberhasilan mereka dibandingkan dengan kepentingan kelompok sasaran.
4. Sasaran pendukung, yaitu kelompok yang secara langsung terlibat atau tidak terlibat dalam mendukung atau memberikan perhatian

terhadap pelaksanaan usaha-usaha kesejahteraan sosial, dan adanya kesediaan mereka untuk terlibat dalam penanganan permasalahan sosial, seperti wartawan, para organisasi profesi, seniman, artis, LSM, dan lain-lain. Pada segmen ini BPI dapat dipasarkan dengan menggunakan metode kampanye sosial melalui media-media seperti: (a) korespondensi / surat menyurat; (b) kunjungan (anjangsana dan anjang karya) ke beberapa daerah-daerah yang rawan, lembaga-lembaga pelayanan masyarakat dsb; (c) karyawisata; (d) demonstrasi ke beberapa setting layanan; (e) pertemuan kelompok (ceramah, kuliah, diskudi, kursus); (f) kelompok pendengar, pembaca, dan pemirsa (KELOMPENCAPIR); (g) pertemuan umum; (i) pameran; (j) pertunjukan; (k) radio; (l) kaset (pita, rekaman); (m) televisi; (n) pemutaran film; (o) media cetak;

Inti dari *kampanye sosial* adalah suatu upaya untuk merubah perilaku masyarakat luas (nasional) dalam waktu yang relatif singkat. Kampanye sosial biasanya ditujukan untuk menghadapi masalah-masalah khusus termasuk keadaan darurat, seperti: KB, koperasi, transmigrasi, kesadaran hukum, Bimas, atau penancangan suatu hal tertentu, dll. Kampanye sosial dilaksanakan dengan segala upaya dan sumber daya yang tersedia, bahkan sering kali tidak memperhitungkan besarnya biaya atau tenaga yang dikeluarkan, asal tujuan tercapai atau masalah yang dihadapi dapat segera di atasi.

Selain itu metode *Social Promotion* juga sangat mungkin digunakan untuk memperkenalkan BPI sebagai suatu produk pendidikan yang aplikatif melalui beberapa media seperti: pameran, periklanan, demonstrasi, kampanye sosial, pendekatan-pendekatan tertentu dan usaha lain yang bersifat *persuasif*. *Social promotion* juga dapat dilihat sebagai usaha propaganda untuk memperkenalkan suatu hasil usaha atau pelayanan yang diberikan. Pelaksanaan promosi sosial dapat menggunakan metode penyuluhan dengan modifikasi yang tepat.

Sebagai salah satu bidang layanan yang bekerja dengan manusia, bimbingan dan penyuluhan berurusan dengan proses perubahan perilaku yang biasanya terjadi dalam diri kelompok sasaran sebagai dampak dari proses penyuluhan sosial yang dilakukan, yaitu: (a) muncul kesadaran; (b) adanya minat; (c) terjadi proses menilai; (d) mau mencoba; dan (e) mau menerapkan (menerima). Agar lebih efektif proses perubahan

perilaku ini perlu dikombinasikan dengan strategi komunikasi yang didasarkan pada pemilihan pendekatan penyuluhan secara tepat.

Paling tidak ada 3 pendekatan yang dapat digunakan untuk mendorong peran yang lebih optimal dari bimbingan dan penyuluhan pada segmen di atas, yaitu: Pertama, efektivitas dan optimalisasi media yang digunakan, seperti : (a) media lisan; (b) media cetak; dan (c) media terproyeksi (berupa gambar atau tulisan, lewat slide, film, LSC, dll.). Kedua, memperjelas sifat hubungan antara konselor / penyuluh dan sasarannya, melalui: (a) komunikasi langsung; dan (b) komunikasi tak langsung. dan Ketiga, pendekatan psiko-sosial, dilakukan melalui : (a) pendekatan perorangan, (b) pendekatan kelompok, (c) pendekatan masalah dan (d) pendekatan kemasyarakatan.

Konsistensi Penerapan Prinsip Bimbingan dan Penyuluhan: Sebuah Solusi Meningkatkan Eksistensi BPI

Bertolak dari pemahaman BPI sebagai salah satu produk dari sistem pendidikan, bimbingan dan penyuluhan sosial memiliki prinsip-prinsip yang harus secara konsisten diterapkan antara lain sebagai berikut. ⁷

- a. *Mengerjakan*, artinya kegiatan penyuluhan harus sebanyak mungkin melibatkan kelompok sasaran untuk mengerjakan / menerapkan sesuatu. Sebagai salah satu bidang layanan aplikatif, BPI perlu sebanyak mungkin memasuki berbagai segmen layanan masyarakat.
- b. *Akibat*, artinya kegiatan bimbingan dan penyuluhan harus memberikan akibat atau pengaruh yang baik atau bermanfaat. Sebagai salah satu bagian dari profesi pertolongan kepada manusia, bimbingan dan penyuluhan perlu memperkuat pengaruh pelayanan bimbingan dan penyuluhan terhadap sasaran agar terus mengkristal menjadi suatu layanan yang adaptif, akuntabel dan responsif.
- c. *Asosiasi*, artinya setiap kegiatan bimbingan dan penyuluhan harus dikaitkan dengan kegiatan yang lainnya.

Menurut Dahama dan Bhatnagar (1980), ada beberapa prinsip yang menjadi dasar di dalam pelaksanaan bimbingan dan penyuluhan yaitu :

⁷ Ibid, hal.

- a. *Principles of interest and needs*, artinya penyuluhan akan efektif jika mengacu pada minat dan kebutuhan kelompok sasaran.
- b. *Grass-roots principles of organization*, artinya penyuluhan hendaknya dilaksanakan dengan melibatkan / menyentuh organisasi kelompok sasaran.
- c. *Principles of cultural differences*, artinya penyuluhan harus memperlakukan keragaman budaya yang ada.
- d. *Principles of cultures change*, artinya penyuluhan harus dilaksanakan dengan bijak dan hati-hati agar perubahan yang terjadi tidak menimbulkan kejutan-kejutan budaya.
- e. *Principles of cooperation and participation*, artinya penyuluhan hanya akan efektif jika mampu menggerakkan partisipasi kelompok sasaran.
- f. *Principle of applied science and democratic approach*, artinya dalam penyuluhan harus selalu memberikan kesempatan kepada kelompok sasaran untuk menawarkan setiap ilmu alternatif yang tepat untuk diterapkan.
- g. *Principle of learning by doing*, artinya penyuluhan harus diterapkan “belajar sambil bekerja” atau “belajar dari pengalaman”.
- h. *Principle of trained specialists*, artinya bahwa penyuluh harus benar-benar orang yang telah memperoleh pelatihan khusus tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan penyuluhan.
- i. *Adaptability principle in the use of extension teaching methods*, artinya bahwa penyuluhan harus diterapkan dengan metoda yang sesuai dengan kondisi (lingkungan fisik, ekonomi dan lingkungan sosial budaya) kelompok sasaran.
- j. *Principles of leadership*, artinya penyuluhan tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang hanya bertujuan untuk kepentingan / kepuasannya sendiri dan harus mampu mengembangkan kepemimpinan.
- k. *Whole family principle*, artinya penyuluhan harus memperhatikan dan melibatkan semua keluarga sebagai satu kesatuan dari unit sosial.
- l. *Principles of satisfaction*, penyuluhan harus mampu mewujudkan tercapainya kepuasan.

Prinsip yang bersifat pengembangan :

- a. *Emphasis on theoretically significant empirical research*, artinya bahwa penyuluhan yang dilaksanakan hendaknya didasarkan pada hasil penelitian sebelumnya.
- b. *Interest in behavioral aspect of inter-dependence of phenomena*, artinya bahwa penyuluhan hendaknya menekankan pada masalah-masalah atau fenomena yang mempunyai keterkaitan dengan masalah atau fenomena lainnya.
- c. *Inter-disciplinary relevance*, artinya bahwa penyuluhan yang dilaksanakan harus melibatkan disiplin lain yang terkait.

Penutup

Ada beberapa urgensi Bimbingan dan Penyuluhan Islam *pertama*, dalam proses penerangan, diartikan sebagai proses untuk memberikan penerangan kepada masyarakat tentang segala sesuatu yang "*belum diketahui dengan jelas*" yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat sehingga menjadi dipahami dan memiliki kemauan dan motivasi untuk melaksanakan / menerapkan dalam rangka peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat. *Kedua*, dalam proses *perubahan perilaku*, yaitu proses pengubahan perilaku yang meliputi: *pengubahan sikap, kemauan dan semangat* masyarakat atau kelompok sasaran sehingga mereka tahu, mau dan memiliki motivasi melaksanakan tugas-tugas kehidupan mereka sesuai dengan tuntutan perubahan dan kebutuhan-kebutuhan dalam rangka peningkatan kesejahteraan sosial mereka. *Ketiga*, dalam proses *pendidikan*, yaitu suatu proses pengubahan kemampuan dan perilaku masyarakat yang meliputi: pengetahuan, sikap dan keterampilan masyarakat sehingga mereka mampu dan mau melaksanakan tugas-tugas dan tanggung jawabnya dan mampu memenuhi kebutuhan-kebutuhan serta mengatasi masalah-masalah yang dihadapinya. *Keempat*, dalam proses *rekayasa sosial*, yaitu proses penerapan rencana-rencana perubahan perilaku sosial masyarakat melalui pendekatan-pendekatan tertentu yang menekankan pada efisiensi dan efektivitas perubahan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Dhama, O.P. and Bhatnagar O.P. (1980). *Education and Communication for Development*, Oxford & Ibh Publishing CO., New Delhi.
- Mardikanto, Totok. (1993). *Penyuluhan Pembangunan Pertanian*. Sebelas Maret University Press: Surakarta.
- Ninik Sri Rejeki. (1998). *Perencanaan Program Penyuluhan*. Universitas Atmajaya : Yogyakarta.
- Nurhadi. (2007). *Mengembangkan Jaminan Sosial Mengentaskan Kemiskinan*. Yogyakarta : Media Wacana.
- Suharto, Edi (2005), *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*, Bandung: Refika Aditama.